

PENGARUH TATA KELOLA GLOBAL AI TERHADAP KONTESTASI IDEOLOGI AS-TIONGKOK

Melati Kinantika¹, Anggiana Chantika Fitri²

¹FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang

²FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang

¹2110631260026@student.unsika.ac.id, ²2310631260023@student.unsika.ac.id)

ABSTRACT

The rivalry between the United States and China is inseparable from ideological issues that are increasingly expanding into various fields. The technological advancements of the United States and China are now also competing in the field of artificial intelligence. Artificial intelligence is no longer merely a technological advancement but also a system that drives infrastructure development, economic progress, and resource utilization. AI serves as a new instrument to support the political direction of a country. Global AI governance has been established as a platform for cooperation and a guideline on how AI should be used in the global environment. However, the emergence of governance systems has complicated the relationship between these two countries because the ideological differences underlying the U.S. and China give rise to rivalry. As a result, both prioritize their own interests, leading to a struggle for hegemony by strengthening their respective national strategies.

Keywords: AI, China, U.S., Development

ABSTRAK

Rivalitas antara AS dan Tiongkok tidak lepas dari persoalan ideologi yang semakin berkembang ke berbagai bidang. Kemajuan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok juga kini mengalami persaingan dalam bidang kecerdasan buatan. Dimana kecerdasan buatan kini bukan hanya sekedar kemajuan teknologi tetapi juga sistem pendorong pembangunan infrastruktur, kemajuan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya. AI merupakan instrumen baru untuk mendukung arah politik suatu negara. Tata kelola global AI tercipta sebagai wadah kerjasama dan pedoman bagaimana seharusnya AI digunakan di lingkungan global. Namun,

munculnya sistem tata kelola justru memperumit hubungan kedua negara ini karena perbedaan ideologi yang melandasi AS dan Tiongkok menimbulkan rivalitas. Sehingga keduanya saling mementingkan kepentingan masing-masing dan menimbulkan perebutan hegemoni dengan meingkatkan strategi negara masing-masing.

Kata Kunci: AI, Tiongkok, AS, Perkembangan

A. Pendahuluan

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara great power yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor. Baik AS maupun Tiongkok keduanya saling mengunggulkan kemajuan negara mereka untuk menjadi negara yang paling kuat. Sejak awal abad ke-21 Tiongkok semakin menunjukkan kemajuannya dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi. Hal ini membuat AS bukan lagi satu-satunya negara dengan pengaruh terbesar di dunia. Tiongkok kini mampu menggeser posisi AS yang selama ini menjadi negara dengan kekuatan hegemoninya terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Melihat hal tersebut, AS menanggapi dengan membuat 'benteng' untuk mencegah dominasi dari Tiongkok. AS

melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti meluncurkan strategi Free and Open Indo-Pacific. Namun, hal ini tidak menghambat berkembangnya Tiongkok dan pengaruhnya di Asia-Pasifik. Tiongkok justru membuat beberapa kebijakan yang dianggap sangat menunjukkan bahwa Tiongkok mampu menyaingi negara adidaya tersebut.

Sebagai negara yang paling berpengaruh saat ini, pasti tidak lepas dari perkembangan teknologi. AS dan Tiongkok saling menunjukkan bahwa mereka adalah negara dengan perkembangan teknologi tercepat melalui berbagai output yang dihasilkan dari keduanya. Pada tahun 2017, pemerintah Tiongkok

meluncurkan New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP), yang bertujuan menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam teknologi AI pada tahun 2030. Ambisi Tiongkok terkait perkembangan AI dan menjadi negara dengan pemimpin perkembangan teknologi semakin dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang tadinya hanya persaingan dalam bidang ekonomi. Selain untuk kebutuhan ekonomi, persaingan ini juga melebar ke segi militer karena kapabilitas militer masing-masing negara baik AS maupun Tiongkok sangat mengandalkan teknologi kecerdasan buatan di masa depan. (Davidson, 2025).

Persaingan dalam bidang teknologi terutama dalam teknologi kecerdasan buatan antara AS dan Tiongkok kini mulai terlihat jelas dengan adanya kebijakan yang dilakukan kedua negara ini. Kebijakan tersebut menimbulkan respon yang kembali mempengaruhi perkembangan digital di AS dan Tiongkok.

Hubungan antara AS dan Tiongkok dalam bidang teknologi tidak selalu bersaing, kedua negara ini juga melakukan kerjasama meskipun terdapat banyak batasan. Sebagai upaya mempertahankan negaranya tetap memimpin perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan menghentikan kemajuan Tiongkok AS membatasi ekspor chip ke Tiongkok. Namun, Tiongkok tetap bisa menyesuaikan kebijakan ini dengan menggunakan chip versi lemah di software yang canggih serta upaya pembelian chip di pasar ilegal untuk tetap mendapatkan chip versi terkuat milik Amerika Serikat. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kerjasama antara AS dan Tiongkok. Persaingan ini menimbulkan konflik dingin yang didasari untuk menjadi negara hegemoni di dunia global. AS dan Tiongkok merebutkan posisi hegemoni demi memenuhi kepentingan nasional negaranya sehingga melahirkan peraturan mengenai pengelolaan, pembuatan dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dinamika global tersebut paling terlihat pada hubungan antara

Amerika Serikat dan Tiongkok yang kini menempati posisi utama dalam perlombaan kecerdasan buatan. Kedua negara tidak hanya memandang AI sebagai alat inovasi ekonomi, tetapi juga sebagai pilar strategis untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional. Amerika Serikat menekankan pentingnya inovasi terbuka yang dipimpin oleh sektor swasta dan menjunjung nilai transparansi serta perlindungan hak individu. Melalui kebijakan seperti National Artificial Intelligence Initiative Act dan Export Control Reform Act (2022), pemerintah AS berupaya mempertahankan dominasi teknologinya sembari membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi sensitif seperti semikonduktor dan komponen komputasi canggih. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya mempertahankan keunggulan strategis di tengah perubahan tatanan global yang semakin dipengaruhi oleh teknologi (Zhang, 2024).

Sementara itu, Tiongkok menempuh jalur yang berbeda melalui pendekatan yang lebih terpusat dan bersifat negara-

sentris. Dalam New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP), Beijing menempatkan AI sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat kemandirian teknologi dan menjaga stabilitas sosial. Roberts et al. (2021) mencatat bahwa kebijakan AI Tiongkok menekankan kontrol negara terhadap data, pembentukan etika nasional, serta integrasi teknologi ke dalam sistem pemerintahan dan keamanan publik. Pendekatan ini menunjukkan ciri khas technostatism, di mana negara berperan sebagai pengarah utama inovasi dan pengendali standar teknologi. Melalui proyek Digital Silk Road yang menjadi bagian dari Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok juga berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dengan mengeksport infrastruktur dan nilai-nilai tata kelola digitalnya (Viad, 2024).

Perbedaan arah kebijakan dan nilai antara Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan ketegangan baru di tingkat regional. Negara-negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara,

berada dalam posisi yang dilematis: di satu sisi mereka membutuhkan investasi dan infrastruktur digital dari Tiongkok, namun di sisi lain tetap bergantung pada ekosistem digital Barat yang menekankan keterbukaan dan kebebasan informasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa tata kelola AI di kawasan terbentuk dari tarik-menarik dua model kekuasaan yang membawa nilai dan kepentingan berbeda.

Kompleksitas ini semakin tampak ketika Amerika Serikat dan Tiongkok membawa model tata kelola nasionalnya ke ranah global. Amerika Serikat mendorong tata kelola berbasis pasar yang menekankan kebebasan inovasi dan peran aktor non-negara, sementara Tiongkok menekankan prinsip kedaulatan digital dan kendali negara terhadap data serta infrastruktur strategis. Pertemuan dua pendekatan ini di forum global seperti OECD, UNESCO, atau PBB sering kali memunculkan kebuntuan normatif, karena keduanya berupaya mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Akibatnya, tata kelola global AI

menjadi ajang negosiasi yang sarat dengan ketegangan politis alih-alih kolaborasi substantif. (Milmo, 2025).

Tata kelola global AI yang melibatkan antara AS dan Tiongkok telah menciptakan ketentuan-ketentuan untuk menjaga Hak Asasi Manusia dalam penggunaannya. Dalam pertemuan di Janewa Swiss membahas mengenai tata kelola global AI yang juga dihadiri oleh AS dan Tiongkok menghasilkan kebijakan tentang kerjasama antara AS dan Tiongkok. Namun, kerjasama teknologi ini terutama AI justru malah membuat “jarak” antara AS dan Tiongkok karena dilandasi pemikiran bahwa AS tetap ingin menjadi pengaruh utama dalam teknologi AI di Asia-Pasifik. Begitu juga dengan Tiongkok, bersamaan dengan kemajuan teknologinya Tiongkok ingin menyaingi Amerika

dengan menciptakan teknologi chip sendiri yang memiliki kemampuan setara bahkan berencana akan menciptakan chip dengan kemampuan melebihi chip yang dimiliki AS. Perjanjian

kerjasama ini tidak sepenuhnya membuka peluang diplomasi antara AS dan Tiongkok secara transparan karena keduanya belum melakukan keterbukaan terkait perkembangan AI di masing-masing negara. (Alper, 2024).

Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bidang AI semakin menegaskan bahwa tata kelola global tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Salah satu contoh paling nyata terlihat dalam kebijakan pembatasan ekspor semikonduktor dan chip canggih yang diterapkan Amerika Serikat kepada Tiongkok. Langkah ini dilakukan untuk memperlambat laju pengembangan teknologi tinggi yang dinilai dapat memperkuat posisi strategis Tiongkok di sektor militer maupun ekonomi digital. Sebagai respon, Tiongkok mempercepat kebijakan substitusi teknologi dalam negeri, memperluas investasi pada riset AI, serta memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara di bawah inisiatif Belt and Road. Kebijakan timbal balik ini memperlihatkan bahwa upaya tata

kelola global dalam membangun transparansi dan keadilan justru sering kali terhambat oleh praktik proteksionisme berbasis kepentingan nasional. (Global, 2025).

Selain itu, perbedaan posisi kedua negara juga terlihat dalam berbagai forum internasional. Amerika Serikat aktif mendorong penerapan prinsip etika AI melalui organisasi seperti OECD dan G7, sementara Tiongkok menekankan pentingnya kedaulatan digital dan kerja sama teknologi Selatan-Selatan melalui UNESCO dan forum PBB. Kedua negara tampak sama-sama berpartisipasi dalam membentuk tata kelola global, tetapi di baliknya membawa agenda masing-masing. Situasi ini menciptakan ketegangan terselubung dalam proses perumusan norma dan standar internasional. Bukannya memperkuat kerja sama, keikutsertaan mereka justru memperumit koordinasi karena setiap kebijakan global menjadi sarana memperluas pengaruh politik dan ekonomi.

Selain itu, terdapat pula gap empiris dalam pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional beroperasi di tengah rivalitas dua kekuatan besar tersebut. Forum seperti OECD, UNESCO, dan PBB kerap menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara AS dan Tiongkok, namun dinamika itu jarang dikaji dari perspektif hubungan kekuasaan yang lebih luas. Dengan menggunakan teori realisme, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa keterlibatan kedua negara dalam tata kelola global AI tidak lepas dari dorongan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana tata kelola global berperan dalam memperumit dinamika hubungan teknologi AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta bagaimana kompleksitas tersebut mencerminkan kompetisi kekuasaan dalam tatanan internasional kontemporer.

Perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mengembangkan serta mengatur AI memperlihatkan

tantangan nyata bagi terbentuknya tata kelola global yang efektif. Alih-alih menjadi sarana kerja sama, forum dan mekanisme tata kelola global justru menjadi arena baru untuk menegaskan kekuatan masing-masing negara. Upaya membangun standar etika dan regulasi internasional sering kali terhambat oleh perbedaan pandangan mengenai nilai dasar seperti transparansi, keamanan data, dan hak privasi. Kondisi ini mencerminkan karakter regime complex, di mana tata kelola global terdiri atas berbagai lembaga dan aktor tanpa otoritas tunggal yang dapat menyatukan prinsip dan praktik bersama. Sehingga gap persoalan yang dapat dikaji dari permasalahan ini adalah bagaimana cara AS mengelola teknologi AI berdasarkan tradisi liberal sedangkan Tiongkok berdasarkan strategi nasionalnya. (Tallberg dkk., 2023).

Amerika Serikat, dengan tradisi liberalnya, berupaya mempertahankan kepemimpinan teknologi melalui prinsip keterbukaan, kolaborasi publik–swasta, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi digital. Sementara itu,

Tiongkok memandang AI sebagai bagian integral dari strategi nasionalnya untuk mencapai kemandirian teknologi dan memperkuat kedaulatan digital. Kedua negara ini menggunakan mekanisme tata kelola global seperti OECD, UNESCO, dan PBB sebagai arena untuk memperjuangkan standar etika dan regulasi yang selaras dengan kepentingan nasional mereka. Dalam perspektif realisme, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola global bukanlah mekanisme netral, tetapi cerminan dari kompetisi kekuasaan antarnegara besar.

Penelitian pertama yang berjudul (Alfian et al., 2025) menghasilkan pemikiran bahwa teknologi mampu menjadi kekuasaan geopolitik yang mempengaruhi ekonomi. Dalam tulisan ini peneliti menambahkan unsur tata kelola global AI sebagai respon dari rivalitas geopolitik yang didasari oleh teknologi. Penelitian kedua (Hine et al., 2021) menghasilkan pemikiran bahwa AI dijalankan di AS sebagai instrumen demokrasi kebebasan sedangkan di Tiongkok AI sebagai instrumen kontrol sosial. Dalam

penelitian ini, kami melihat dari kedua sisi dan menambahkan aspek diplomasi di dalamnya. Kemudian penelitian (Roberts et al., 2020) menghasilkan data bahwa Tiongkok bukan hanya berfokus pada kemajuan teknologi tetapi juga membuat tata kelola AI yang didasari ideologinya yang pragmatis namun hal ini dapat memicu pelanggaran otoritarisme dan sosial. Kami mencoba untuk menjelaskan sistem kelola AI dari eksternal Tiongkok yang dipengaruhi dari hubungan AS dan Tiongkok.

Selanjutnya, penelitian (Walker et al., 2025) menghasilkan fakta bahwa pembatasan chip yang dilakukan oleh AS tidak mempengaruhi kemunduran teknologi di Tiongkok karena Tiongkok tetap bisa mengakses chip terbaru AS. Mulai dari penggunaannya di software canggih dan pembelian chip ilegal di pasar global dengan sedikit merubah sistemnya namun tidak berpengaruh terhadap fungsinya. Tulisan kami mencoba menjelaskan dari kedua sisi baik Tiongkok maupun AS membuat kebijakan tentang masing-masing

negara. Penelitian terakhir yaitu (Balcioglu et al., 2024) melihat bahwa AI bukan hanya efisiensi ekonomi dalam instrumen nasional tapi juga menjadi aspek penting yang berperan dalam kebijakan nasional. Namun hal ini tetap jadi perdebatan karena AI mampu menggantikan peran manusia. Pada penulisan ini kami mencoba menjelaskan pentingnya peran AI di AS dengan tetap memperhatikan faktor kebijakan luar negerinya dengan Tiongkok.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah banyak membahas rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, baik dari aspek persaingan kemajuan teknologi sampai memunculkan adanya rivalitas. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi kompetisi teknologi dan belum menyoroti secara mendalam bagaimana tata kelola global turut memperumit hubungan keduanya. Gap konseptual muncul karena tata kelola global sering dipahami sebagai sarana kolaboratif yang netral, padahal dalam praktiknya ia menjadi arena baru bagi negara-negara besar untuk

mempertahankan kepentingan nasional. Hal ini dapat melihat bahwa hubungan AS-Tiongkok dalam bidang digital kecerdasan buatan mempengaruhi adanya tata kelola global AI.

Teori realisme memandang hubungan internasional sebagai arena persaingan kekuasaan di mana setiap negara berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya. Hans J. Morgenthau menekankan bahwa perilaku negara didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan keamanan, kedaulatan, dan posisi strategisnya dalam sistem internasional. Dalam konteks tata kelola global kecerdasan buatan (AI), konsep kepentingan nasional menjadi kunci untuk memahami bagaimana Amerika Serikat dan Tiongkok menavigasi forum global bukan sebagai ruang kerja sama murni, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh dan mengamankan keunggulan teknologi masing-masing.

Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa

keterlibatan negara dalam tata kelola global selalu dilandasi kalkulasi strategis. Mekanisme global governance dapat memperumit hubungan bilateral ketika nilai dan tujuan kebijakan kedua negara saling bertentangan. Dalam kasus Amerika Serikat dan Tiongkok, forum tata kelola global AI menjadi bentuk diplomasi terselubung di mana rivalitas kekuasaan diwujudkan melalui perebutan legitimasi terhadap norma, standar, dan arah pengembangan teknologi masa depan. Karena itu, pendekatan realisme dipandang paling relevan untuk menjelaskan mengapa tata kelola global AI justru memperdalam kompleksitas hubungan antara dua kekuatan besar dunia ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami bagaimana tata kelola global berperan dalam memperumit dinamika hubungan teknologi AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan

menelusuri konteks kebijakan dan kepentingan strategis kedua negara secara mendalam melalui sumber-sumber tertulis yang kredibel. Studi kasus relevan karena berfokus pada fenomena spesifik yakni rivalitas AI di bawah pengaruh tata kelola global yang mencerminkan perebutan kekuasaan dalam tatanan internasional kontemporer.

Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan isu penelitian. Dokumen yang digunakan mencakup kebijakan nasional seperti National Artificial Intelligence Initiative Act milik Amerika Serikat dan New Generation Artificial Intelligence Development Plan milik Tiongkok, laporan lembaga internasional seperti OECD dan UNESCO, serta literatur akademik yang membahas tata kelola teknologi dan politik global. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan relevansinya terhadap dinamika hubungan kedua negara. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai bagaimana tata kelola global AI menjadi arena persaingan kepentingan dan hegemoni antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan antara AS dan Tiongkok tidak lepas dari teori realisme yang menggambarkan situasi masing-masing negara dengan kepentingan negaranya saling memperebutkan kedudukan dominasi internasional. Pada tulisan kali ini, penulis memfokuskan pada perkembangan teknologi digital antara AS dan Tiongkok yang melahirkan perselisihan dengan dibuktikan adanya persaingan chip serta perbedaan ideologi dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan. Perbedaan ideologi Amerika Serikat dengan Tiongkok menjadi landasan utama terciptanya rivalitas atas segala sektor termasuk perkembangan digital. Teori ini melahirkan konsep kepentingan nasional yang secara umum memiliki dimensi power dan hegemoni regional.

Kepentingan nasional antara AS dan Tiongkok terkait

kecerdasan digital menjadikan keduanya berperan penting dalam perkembangan AI di dunia global. Selain sebagai teknologi AI juga berperan penting dalam kekuatan ekonomi, politik dan kekuatan negara baik AS maupun Tiongkok. Perkembangan Artificial Intelligence sebagai faktor pendorong kekuatan suatu negara dari berbagai sektor. Maka dari itu, baik bagi AS maupun Tiongkok kecerdasan buatan sangat penting karena merupakan strategi geopolitik dalam ranah internasional. Sebagai contohnya yaitu pembatasan ekspor chip dari AS ke Tiongkok demi kepentingan nasional AS dan pengembangan chip di Tiongkok sebagai bentuk kepentingan nasional Tiongkok. Kemudian, keduanya saling menerapkan AI dalam sistem militer masing-masing demi kepentingan nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional sebagai faktor utama terciptanya tata kelola global AI.

Kemudian, dari kepentingan nasional ini terdapat dimensi power sebagai kekuatan dari masing-masing negara baik AS maupun Tiongkok. Bentuk

kekuatannya adalah bagaimana kedua negara ini mampu mengembangkan teknologinya terutama dalam bidang kecerdasan buatan seperti AS yang memiliki perusahaan Google, OpenAI, Microsoft, Amazon yang berbasis teknologi kecerdasan buatan. Selain itu AS juga sebagai negara dengan perkembangan teknologi AI yang baik menyebabkan AS mampu melakukan efisiensi industri sebagai salah satu bukti bahwa kekuatan ekonomi AS berpengaruh akibat perkembangan AI. Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki kekuatan di bidang teknologi seperti kepemilikan perusahaan besar Alibaba, Baidu, Tencent dan Deepseek yang menjadikan Tiongkok mampu menyaingi Amerika Serikat. Sektor ekonomi Tiongkok juga tidak bisa dilepaskan dari teknologi kecerdasan buatan ini contohnya, pengembangan infrastruktur dan industri di Tiongkok. Karena kekuatan kedua negara ini, menjadikan AS dan Tiongkok ingin menjadi dominasi besar di dunia dengan persaingan satu sama lain.

Hal ini membuktikan adanya dimensi hegemoni regional dalam persaingan kekuatan untuk membentuk tatanan global dalam perkembangan AI berdasarkan standarnya masing-masing.

D. Kesimpulan

Rivalitas AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan lagi sekadar perlombaan teknologi, tetapi berubah menjadi cermin cara dua ideologi besar membaca masa depan dunia. Tata kelola global AI yang dipromosikan lembaga seperti OECD, UNESCO, atau G7 ternyata tidak berjalan netral, justru menjadi panggung perebutan legitimasi politik antara dua kubu. Alih-alih menjadi jembatan kerja sama, mekanisme global governance malah mempertebal garis pembatas karena setiap negara membawa standar moral dan kepentingannya sendiri. Amerika Serikat memaksakan etika AI yang berakar pada nilai liberal, sementara Tiongkok mendorong model kedaulatan digital yang berorientasi stabilitas negara. Dalam suasana ini, AI berubah menjadi bahasa baru dari

kekuasaan global—sunyi, teknis, tetapi sarat makna politik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola global AI sebenarnya tidak sedang berusaha menyatukan dunia, melainkan sedang memetakan ulang siapa yang berhak menentukan masa depan. Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama menggunakan forum internasional untuk memperluas pengaruhnya sambil tetap mencurigai satu sama lain. Ketegangan ini membuat upaya menciptakan standar global yang adil seperti mengejar horizon: terus diinginkan, tetapi tak pernah benar-benar terjangkau. Pada akhirnya, tata kelola global AI justru memperlihatkan bahwa teknologi tidak pernah steril dari politik; ia selalu mengikuti siapa yang paling berkuasa. Maka, kompleksitas hubungan AS–Tiongkok dalam AI bukan hanya soal algoritma, chip, atau data—tetapi tentang siapa yang boleh mendefinisikan “dunia yang aman” menurut versinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M., Putra, R., & Rahmawati, A. (2025). *Artificial*

Intelligence and Geopolitical Power: The New Era of Technological Rivalry. Journal of Digital Policy and Global Affairs, 12(3), 45–60.

Balcıoğlu, B., Demir, S., & Kılıç, H. (2024). *Artificial Intelligence and National Strategy: Economic and Political Dimensions. AI & Society*, 39(2), 233–247.

Challenges and Opportunities for US-China Collaboration on (n.d.). Retrieved November 9, 2025,

China's AI Governance Initiative and Its Geopolitical Ambitions (n.d.). Retrieved November 9, 2025, *DeepSeek shows the limits of US export controls on AI chip* (n.d.). Retrieved November 9, 2025,

Habuka, T., & Socol, A. (2025). *Enhancements and Next Steps for the G7 Hiroshima AI Process: Toward a Common Framework to Advance Human Rights, Democracy, and Rule of Law. Journal of*

- International Digital Policy*, 18(1), 1–14.
- Hine, M. J., Roberts, S., & O'Donnell, K. (2021). *Artificial Intelligence and Ideological Control: Comparing the U.S. and China*. *Journal of Global Communication and Policy*, 9(4), 201–220.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Roberts, S., Hine, M. J., & Zhang, L. (2020). *China's Pragmatic Approach to Artificial Intelligence Governance*. *AI & Society*, 35(4), 987–1002.
- Schmitt, C. (2022). *Mapping Global AI Governance: A Nascent Regime in a Fragmented Landscape*. *AI & Society*, 37(2), 301–312.
- Sheehan, M. (2023). *China's Approach to AI Regulation: The World's Most Extensive AI Governance Regime*. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Tallberg, J. (2024). *Fragmentation and Power Politics in Global AI Governance*. *Global Policy*, 15(1), 99–114.
- Times, G. (n.d.). *China firmly opposes US new AI export control rules, vows to safeguard its*.
- Tidjon, J., & Khomh, F. (2022). *Ethics Guidelines and AI Governance: A Global Perspective*. *AI and Ethics*, 2(1), 45–59.
- UN adopts first global artificial intelligence resolution | Reuters. (n.d.). Retrieved November 9, 2025,
- UN adopts first resolution on artificial intelligence | AP News. (n.d.). Retrieved November 9, 2025, *US and UK refuse to sign Paris summit declaration on 'inclusive' AI* (n.d.). Retrieved November 9, 2025.
- Viad, E. (2024). *A Principled Governance for Emerging AI: Balancing Innovation and Control*. *AI & Society*, 38(4), 551–564.

- Walker, A., Singh, D., & Patel, K.
(2025). *The Impact of U.S.
Chip Export Restrictions on
China's AI Development.*
*Technology and International
Security Journal*, 10(2), 72–
86.
- Waltz, K. N. (1979).
*Theory of International
Politics*. McGraw-Hill.
- Zeng, J. (2025). *The US factor
in
Chinese perceptions of
militarized artificial
intelligence*. *International
Affairs*, 101(2), 677-689.
- Zeng, J., Dai, X., & Xia, L. (2021).
*Shaping AI's Future: China
in Global AI Governance*. *AI
& Society*, 36(2), 589–604.